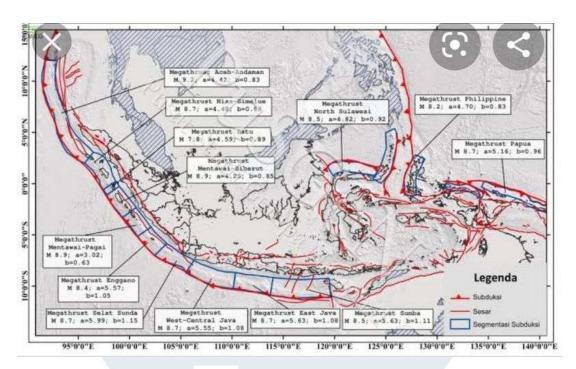
BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam konteks kebencanaan, komunikasi memegang peran sentral sebagai penghubung antara informasi yang tepat. Lebih dari sekedar menyampaikan pesan, komunikasi kebencanaan berfungsi untuk membentuk pemahaman, mengarahkan perilaku, serta memperkuat kesiapsiaagan publik dalam mengahadapi potensi risiko. Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa komunikasi yang terencana dan inklusif mampu mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat secara signifikan, sehingga dapat mengurangi dampak bencana secara menyeluruh. Tak hanya itu juga, komunikasi menjadi kunci dalam koordinasi antar lembaga serta penyebaran informasi yang akurat dan cepat, terutama melalui media massa yang berperan sebagai saluran edukasi dan peringatan dini. Maka dari itu, penting untuk menempatkan komunikasi kebencanaan sebagai elemen strategis dalam penyampaikan mitigasi bencana, termasuk dalam konteks pendampingan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Urgensi komunikasi kebencanaan semakin meningkat ketika pertimbangan kondisi geografis Indonesia yang memiliki risiko bencana alam tinggi (Tresnanti et al., 2024., Putra et al., 2024)

Menurut Widia (2022) Indonesia merupakan bagian dari *ring of fire* atau Cincin Api Pasifik yang dimana adalah sebuah kawasan yang membentang di sekitar Samudra Pasifik yang memiliki banyak gunung berapi. Letak Indonesia yang berada di atas pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik yang menyebabkan Indonesia rawan dilanda gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami Menurut BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), ada beberapa tempat atau segmen di Indonesia yang dapat menimbulkan gempa yang tidak biasa (BMKG, 2025).



Gambar 1. 1 Peta ring of fire

Sumber: BMKG, 2025

Sebagai respon terhadap bencana ini, tidak hanya dibutuhkan kehadiran lembaga-lembaga penanggulangan bencana dan program edukasi masyarakat, tetapi juga strategi komunikasi kebencanaan yang sesuai dengan target. BRIN menekankan pentingnya komunikasi kebencanaan melalui pendekatan struktural maupun non struktural yang dapat dilakukan oleh pemerintah setempat, organisasi setempat, bahkan seluruh warga. Pendekatan struktural yang maksud di sini meliputi pembangunan tanggul penahan tsunami, pemecahan ombak, serta penataan ruang di Kawasan pesisir. Sedangkan pendekatan non struktural melibatkan kesiapsiagaan atau mitigasi bencana masyarakat melalui edukasi kebencanaan, pelatihan simulasi evakuasi, serta penyediaan jalur dan Lokasi evakuasi yang memadai (BRIN, 2024).

Salah satu implementasi dari strategi komunikasi kebencanaan nonstruktural ini dapat dilihat melalui inisiatif UNESCO (*United Nations Educational*, Scientific and Cultural Organization) yang memverifikasi Tsunamy Ready Program. Program ini secara aktif menghimbau komunitas di zona megathrust untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana tsunami.

Seperti yang dilakukan oleh UNESCO (*United Nations Educational*, *Scientific and Cultural Organization*) dalam upaya komunikasi kebencanaan non struktural dengan melakukan verifikasi *Tsunami Ready Program* kepada desa-desa yang berada pada zona *megathrust* dan memiliki potensi terdampak. Program ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang tangguh melalui strategi kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang akan melindungi kehidupan, mata pencaharian dan harta benda dari tsunami di berbagai wilayah pesisir atau yang terdampak (UNESCO, 2025).

Upaya serupa juga terlihat di tingkat lokal, seperti di Kabupaten Lebak, Banten. Masyarakat di wilayah ini turut menginisiasi sistem mitigasi berbasis komunitas sebagai respons terhadap ancaman bencana, didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, organisasi *non*-pemerintah, serta akademisi. Kabupaten ini merupakan wilayah yang rentan terhadap berbagai bencana, terutama banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Kesadaran akan risiko bencana ini mendorong masyarakat setempat untuk membangun sistem mitigasi berbasis komunitas, dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi *non*-pemerintah, serta akademisi.

Komitmen masyarakat Kabupaten Lebak dalam membangun sistem mitigasi berbasis komunitas semakin relevan mengingat tingginya risiko bencana di wilayah ini. Dalam kaitan dengan upaya komunikasi kebencanaan yang disebutkan sebelumnya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan laporan BNPB, diidentifikasi sebagai salah satu wilayah prioritas dengan tingkat risiko dan probabilitas tsunami yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh posisinya yang berada dalam zona *megathrust* Selat Sunda dan Selatan Jawa (BNPB Banten, 2021).

Kondisi geografis dan tingginya potensi bencana ini mendorong masyarakat Kabupaten Lebak untuk tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ketangguhan komunitas. Upaya mitigasi yang dilakukan mencerminkan pentingnya strategi komunikasi kebencanaan yang tidak hanya berbasis pada kebijakan struktural, tetapi juga pendekatan *non*-struktural yang lebih partisipatif. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi faktor kunci dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana, termasuk tsunami dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif.

Maka dari itu, diperlukan strategi komunikasi kebencanaan yang tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga selaras dengan karakteristik lokal Kabupaten Lebak. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap elemen masyarakat, bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait, dapat berkolaborasi dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tsunami.

Implementasi strategi komunikasi kebencanaan ini tidak bisa dilepaskan dari pendekatan yang sejalan dengan kondisi sosial dan geografis Kabupaten Lebak. Oleh sebab itu, penting untuk memadukan strategi berbasis struktural baik non-struktural yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan demi memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana tsunami.

Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya implementasi strategi komunikasi kebencanaan berbasis pendekatan struktural dan non struktural yang disesuaikan dengan karakteristik lokal Kabupaten Lebak. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan Lembaga terkait menjadi krusial untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tsunami. Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Dian Tamidiani, et al. (2019) dalam Inovasi Model Mitigasi Bencana *non* Struktural berbasis komunikasi, informasi mengatakan dalam proses komunikasi kebencanaan *non* struktural peran komunikator sangatlah penting untuk memberi komando, pengendalian dan koordinasi. Pendekatan yang dilakukan melalui sosialisasi dengan komunitas untuk mengkomunikasikan dampak bencana yang akan datang (Tamitiadini et al., 2019).

Implementasi strategi ini mulai terlihat dalam berbagai inisiatif lokal yang melibatkan masyarakat secara aktif. Salah satu contohnya adalah Desa Panggarangan di Kabupaten Lebak Selatan, yang berhasil menjadi desa pertama di Banten yang lolos verifikasi 'Siap Tsunami'. Salah satu desa pesisir di Kabupaten Banten Lebak Selatan, desa Panggarangan didaulat menjadi desa pertama di Banten yang mengupayakan dan lolos verifikasi 'Siap Tsunami'. Keberhasilan ini diduga karena adanya inisiasi dari organisasi kebencanaan setempat yang bernama Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS).

Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) adalah organisasi setempat yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat desa Panggarangan dalam menghadapi potensi bencana. Dibalik keberhasilannya, desa Panggarangan menyimpan fakta yang ironi dibaliknya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua GMLS dan hasil survei dari peneliti sebelumnya, masyarakat desa Panggarangan masih memiliki keterbatasan pengetahuan dalam kebencanaan (Anis Faisal Reza, 2024; Prestianta et al., 2023).

Berangkat dari temuan ini, GMLS semakin menggencarkan penyebaran komunikasi kebencanaan melalui berbagai program-programnya. Bertema besar Tsunami Ready Program, GMLS membagi menjadi beberapa program yang menyesuaikan targetnya, seperti, Teduh Gemuruh rangkaian pertunjukan berlatarkan mitigasi bencana, Teriakan Anak Pantai yang menggunakan pameran untuk menyampaikan mitigasi bencana dan Apa Salahnya Siaga yang menggunakan teater sebagai sarana penyampaian mitigasi bencana, dari ketiga program tersebut bertarget masyarakat luas desa Panggarangan. Sedangkan Puisi Penyelamatku bertargetkan anak sekolah menegah pertama, Sora Muda-Mudi yang bertargetkan organisasi kalangan anak muda setempat dan Salamat Sadayana yang menuju target pendamping disabilitas (Palapa News, 2022).

Salah satu program yang tidak melupakan prinsip poin 10 *no one left behind* yang digaungkan oleh UNESCO dan SDGs adalah Salamat Sadayana. Program ini secara khusus berfokus pada peningkatan kapasitas pendamping disabilitas dalam situasi darurat, memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, turut menjadi bagian dari upaya kesiapsiagaan bencana. Selain itu,

karena program ini adalah kali pertama dilakukan dengan target pendamping disabilitas.

Salamat Sadayana sendiri diambil dari bahasa Sunda 'Salamat' yang artinya 'Selamat', 'Sadayana' yang artinya 'Semua', berarti Selamat Semua. Dari pengartian tadi, mencerminkan target yang dituju yaitu keselamatan untuk semuanya, terkhusus kelompok rentan, seperti disabilitas. Hal ini juga memiliki keselarasan tujuan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Selain itu, terungkap dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak penyelenggara Salamat Sadayana, penyasaran target ini diperkuat dengan adanya temuan sekolah untuk kebutuhan khusus atau SKH Purnama di desa Panggarangan. Pada SKH Purnama memiliki berbagai kondisi penyandang, namun didominasi dengan Tunagrahita. Tunagrahita adalah anak keterbutuhan khusus yang memiliki hambatan kecerdasan yang memiliki kecenderungan kurang peduli terhadap lingkungannya, baik dalam keluarga ataupun lingkungan sekitarnya sehingga membutuhkan kurikulum yang disesuaikan berserta pendampingan (Sitanggang et al., 2023).

Keberadaan SKH Purnama memudahkan bagi program Salamat Sadayana dalam penetapan target serta pelaksanaan program sosialisasi untuk menyampaikan komunikasi kebencanaan. Pemilihan pendamping disabilitas sebagai target utama program ini didasarkan pada kebutuhan untuk mendukung penyandang disabilitas, khususnya Tunagrahita, yang memerlukan pendamping khusus dalam memahami mitigasi bencana (Kikin Tarigan, 2022).

Pendamping disabilitas memiliki peran vital dalam mendukung penyandang disabilitas untuk memahami komunikasi kebencanaan, terutama melalui dukungan dalam pengambilan keputusan (*Supported Decision-Making*). Hal ini sering juga disebut sebagai alternatif yang dapat menjamin kebebasan orang yang memiliki keterbatasan atau disabilitas dalam mengambil keputusan untuk merepresentasikan preferensi mereka, mengambil keputusan, dan membantu memperjuangkan hak mereka (Kyle B, 2012). Selain itu, pendamping disabilitas juga berfungsi sebagai

fasilitator selama proses komunikasi kebencanaan, serta memastikan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas terpenuhi secara tepat (BNPB, 2014).

Bila berbicara mengenai pendamping disabilitas, Salamat Sadayana menyasar pendamping disabilitas di SKH Purnama, seperti Orangtua, Guru dan tetangga yang memiliki anak disabilitas. Adanya spesifikasi dalam penargetan ini didasarkan karena penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus terhadap aspek emosional. Sehingga hubungan emosional antara pendamping dan penyandang dapat meningkatkan efektivitas pendampingan (Paud Lectura & Lectura, 2022). Menurut Waleleng et al., (2022) salah satu strategi pendekatan yang dapat diimplementasi dalam upaya komunikasi kebencanaan adalah melalui program sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Dalam konteks pendamping disabilitas, sosialisasi menjadi semakin krusial karena mereka memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kebencanaan kepada penyandang disabilitas yang mereka dampingi. Dengan adanya sosialisasi yang tepat, pendamping disabilitas diharapkan dapat menjadi perantara yang handal dalam membantu dan meneruskan komunikasi kebencanaan.

Salah satu bentuk strategi implementasi komunikasi kebencanaan yang dilakukan ialah sosialisasi mitigasi bencana oleh Salamat Sadayana untuk pendamping disabilitas. Program sosialisasi ini dilakukan selama dua hari, hari pertama sosialisasi dilakukan di SKH Purnama dan diabadikan di akun instagramnya dan hari terakhir dilakukan door-to-door ke rumah pendamping disabilitas sebagai bentuk evaluasi setelah sosialisasi. Berangkat dari hasil wawancara yang dilakukan Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) terkait keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana, hal ini sekaligus menjadi tujuan program sosialisasi yang dilakukan Salamat Sadayana. Pada program sosialisasi di hari pertama menghadirkan pembawaan materi pengenalan karakteristik disabilitas oleh Melina Lestari dari Kidzsmile, simulasi dan pelatihan

Penyelamatan, Perlindungan dan Evakuasi oleh Idzma Mahayattika Kidzsmile dan di tutup oleh Materi Mitigasi Bencana oleh Kikin Tarigan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Di hari kedua, sebagai bentuk evaluasi dari program sosialisasi sebelumnya, Salamat Sadayana melakukan *door-to-door* untuk mengetahui evaluasi cara implementasi yang terbaik dalam menyampaikan komunikasi kebencanaan.

Selama proses pelaksanaan program sosialisasi yang dilakukan oleh Salamat Sadayana, tergambar bahwa pentingnya menerapkan strategi komunikasi kebencanaan yang efektif dan inklusif bagi pendamping disabilitas. Oleh karena itu, untuk menganalisis pendekatan komunikasi kebencanaan yang dijalankan, penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme untuk menganalisis bagaimana komunikasi kebencaan yang diimplementasi oleh Salamat Sadayana untuk pendamping disabilitas. Metode yang digunakan untuk mendukung pendekatan ini adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk memudahkan penganalisis menggunakan *c-planning* SBCC, serta mengetahui strategi apa yang digunakan selama proses komunikasi melalui wawancara dan dokumentasi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, bila ditarik benang merahnya bahwa adanya komunikasi kebencanaan belum tersentuh secara meluruh, meskipun Desa Panggarangan telah ditetapkan sebagai Desa 'Siap Tsunami'. Kenyataan yang terjadi masih adanya keterbatasan dalam pengetahuan kebencanaan di kalangan masyarakat. Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) mengungkapkan bahwa pengetahuan mengenai kebencanaan rendah, termasuk di kelompok-kelompok tertentu, salah satunya kelompok disabilitas. Sama halnya dengan masyarakat luas yang ada di Desa Panggarangan, disabilitas di sana memiliki keterbatasan pengetahuan kebencanaan juga. Hal ini diketahui oleh GMLS ketika sedang melakukan penelusuran di Sekolah Khusus (SKH) Purnama yang dimana menunjukkan mayoritas penyandang

disabilitas di sana adalah Tunagrahita. Tunagrahita adalah penyandang yang membutuhkan peran pendamping dalam proses pembelajarannya, namun sayangnya dengan keadaan lapangan tadi masih kurangnya pengetahuan terhadap kebencanaan. Berdasarkan masalah keterbatasan pengetahuan kebencanaan tadi, maka dalam penelitian ini memfokuskan pada, bagaimana Gugus Mitigasi Lebak Selatan perancangan program Salamat Sadayana untuk meningkatkan pengetahuan terhadap komunikasikan kebencanaan, terlebih lagi untuk pendamping disabilitas.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berikut pertanyaan dari penelitian ini:

Bagaimana strategi komunikasi kebencanaan yang diterapkan Gugus Mitigasi Lebak Selatan untuk pendamping disabilitas menggunakan implementasi framework Social Behavior Change Communications (SBCC) melalui program Salamat Sadayana?

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:

Menganalisis komunikasi kebencanaan yang diterapkan oleh Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) untuk pendamping disabilitas dengan perencanaan *framework Social Behavior Change Communications (SBCC)* yang dilakukan Gugus mitigasi Lebak Selatan (GMLS) kepada pendamping melalui program Salamat Sadayana.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, kegunaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep kebencanaan dengan menggunakan *framework Social and Behavior Change Communication (SBCC)* dalam menyampaikan komunikasi kebencanaan, khususnya dalam konteks kelompok rentan, seperti disabilitas dan pendampingnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk praktisi kebencanaan, terutama adalah para komunitas disabilitas dan pemerintah dalam mengembangkan strategi komunikasi yang berkelanjutan.

1.5.3 Manfaat Sosial

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat sosial yang penting dalam mendukung upaya kesiapsiagaan bencana yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Dengan menyoroti peran strategis pendamping disabilitas dalam memahami dan menyampaikan informasi mitigasi bencana, studi ini membantu membangun kesadaran kolektif bahwa kesiapsiagaan tidak bisa bersifat eksklusif. Melalui pendekatan komunikasi berbasis *Social Behavior Change Communication* (SBCC), penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan komunitas disabilitas untuk mewujudkan sistem mitigasi bencana yang adil dan merata. Selain itu, hasil penelitian ini turut mendorong terciptanya ruang edukasi publik yang dapat meningkatkan keterlibatan sosial dan empati terhadap penyandang disabilitas, memperkuat prinsip "no one left behind" dalam agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).

